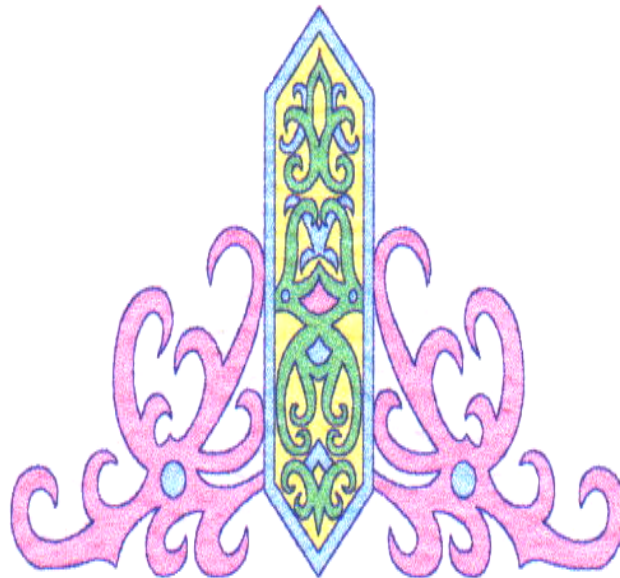


PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2018**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA**



**PALANGKA RAYA
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018.

Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2018, harus dilakukan Evaluasi Tingkat Capaian Keberhasilannya.

Capaian Keberhasilan / Kinerja yang terakreditasi melalui penilaian dengan standar yang telah ditetapkan sebagai pembanding keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disesuaikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Visi dan Misi Instansi Pemerintah dalam kerangka perwujudan Good Governance.

Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kritik, saran dan pemikiran yang sifatnya membangun sangatlah diperlukan dimasa-masa datang.

Sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama segenap rekan-rekan pejabat/staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas bantuan dan kerja kerasnya dalam pelaksanaan Tugas selama Tahun 2018 ini.

Palangka Raya, Maret 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Ir. JANUMINRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198903 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi	4
1.5 Permasalahan Umum	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Pernyataan Visi Organisasi	7
2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis	8
2.3 Kebijakan dan Program	9
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017	11
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018	15
3.4 Analisa Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2018	16
BAB. IV PENUTUP	17
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis	17
Lampiran	19
Capaian realisasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.....	19



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mengacu dari Visi dan Misi serta Rencana Strategis sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Aspek Strategis yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan Politik adalah berupa Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan capaian kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, berkaitan dengan kondisi Sosial Ekonomi, Kultural, sehingga berbagai Gejolak Sosial semakin berkurang dan Sinergisme Komunikasi Sosial serta Komunikasi Politik dalam rangka menunjang Pembangunan menjadi semakin ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran Program Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilakukan, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya dapat dikategorikan cukup baik, namun harus dilakoni bahwa masih banyak sasaran yang belum tersentuh capaian target yang diinginkan dalam tahun 2018 dan sebagai langkah perencanaan strategis tahun berikutnya.

Demikian pula Capaian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Kategori Capaian Cukup Baik karena dalam pelaksanaannya dapat memenuhi target kegiatan seperti yang direncanakan.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunrabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam Good Governance dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legistimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja Tahun 2018.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

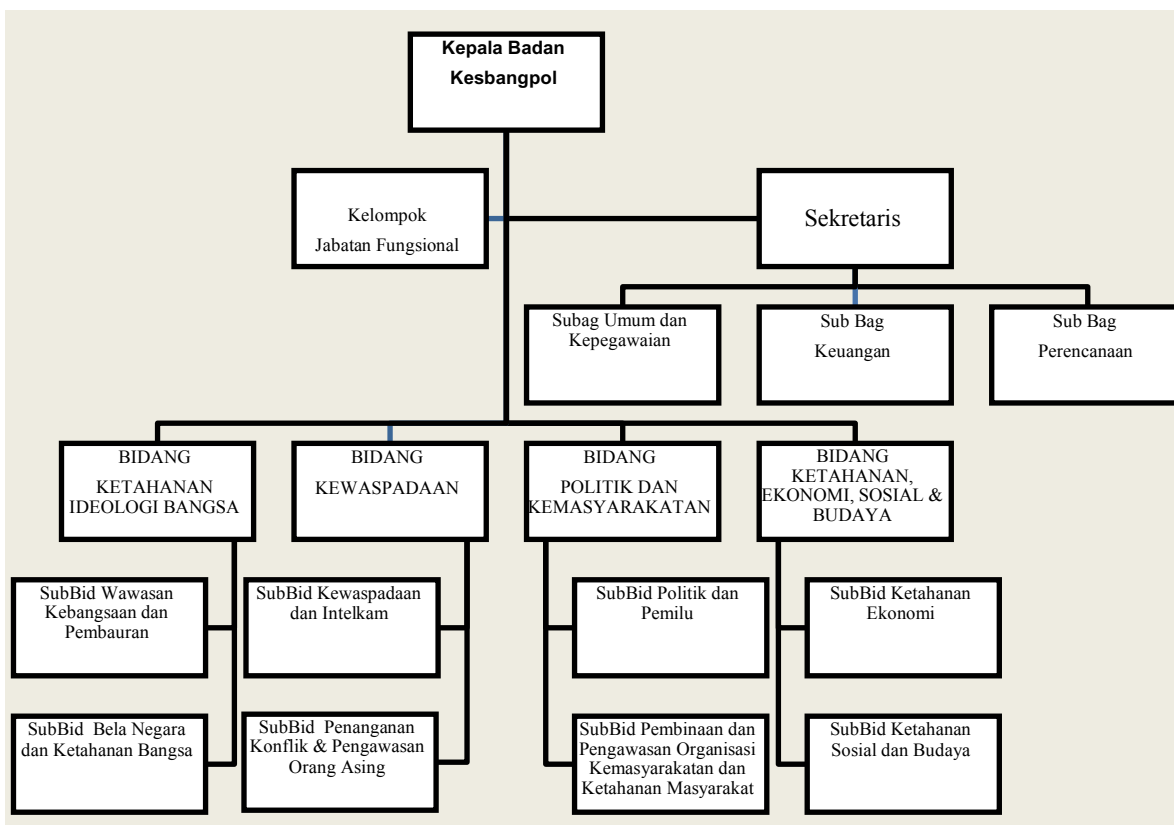
Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya yaitu pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik

Untuk mengaktualitas tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai struktur organisasi seperti di tunjuk pada gambar 1.1 pada halaman berikut .



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan konditivitas daerah dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya faham sarat kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualitas Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena sebagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elitanya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitas dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- (1) Mutasi atau promosi pada staf dan pejabat tidak sesuai dengan keadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sehingga masih ada pegawai yang rangkap tupoksi.
- (2) Anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, khususnya menyangkut belanja tidak langsung seperti kegiatan Pelaksanaan Pemilu yang kurang memadai dalam pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemilu.
- (3) Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam politik ;
- (4) Masih kurangnya komunikasi antar Organisasi Politik, Ormas dan Pemuda.
- (5) Menurunnya nilai - nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (6) Fasilitasi pendirian tempat ibadah masih diperlukan karena masyarakat banyak yang kurang paham.
- (7) Masih banyak pelanggaran HAM dan KDRT.
- (8) Pengawasan terhadap orang asing masih lemah.
- (9) Reformasi tentang deteksi dini masih kurang sarana dan prasarana.
- (10) Kesadaran masyarakat masih kurang terutama menyangkut keamanan dan ketertiban.
- (11) Kurangnya informasi yang cepat dan akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat.

1.6 Sistematika Penyajian.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategi Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

- 2.1 Rencana Strategis 2013 - 2018
- 2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis
- 2.3 Kebijakan dan Program
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2018
- D. Analisa Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2018

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 antara lain :

- a) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat di Kota Palangka Raya yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
- b) Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kota Palangka Raya, seperti daerah terpencil dan daerah pinggiran sungai, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- c) Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideology politik asing yang tidak sesuai dengan ideology Pancasila dan UUD 1945.
- d) Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.
- e) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

1. PERNYATAAN VISI.

- a. Bahwa tantangan masa depan yang semakin kompleks yang diwarnai dengan berbagai perubahan dinamis sebagai konsekuensi dari demokratisasi perlu senantiasa diantisipasi secara terus menerus dengan mengembangkan berbagai peluang dan inovasi politik.
- b. Visi yang dirumuskan adalah sebagai aspek strategis dalam mengarahkan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya jauh kedepan pada apa yang ingin dicapai Pemerintah.
- c. Rumusan Visi Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”

2. PERNYATAAN MISI.

Komitmen yang telah disepakati merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Visi Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan dirumuskan dalam Misi dengan ditetapkannya Misi Organisasi diharapkan seluruh

Pegawai Negeri Sipil dan pihak-pihak berkepentingan lainnya hendaknya dapat mengetahui dengan jelas Peran dan Program Kerja serta hasil yang ingin dicapai Organisasi.

Adapun Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah masuk kedalam misi 5 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang”

Untuk melaksanakan Misi tersebut dibuat program kerja meliputi :

- a. Memanfaatkan iklim kondusif, sosial /Politik masyarakat secara bijaksana untuk partisipasi pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Menyelenggarakan Koordinasi.
- d. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat sekitar Kesatuan Bangsa, Integrasi Kebangsaan.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

2.2 TUJUAN / SASARAN STRATEGIS.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses Perencanaan Strategis Organisasi dari Tahun ketahun Anggaran berikutnya sejalan dengan rumusan untuk masing-masing tujuan yang ingin di capai dalam Tahun Anggaran bersangkutan.

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kehidupan sosial dan budaya dengan menjunjung tinggi filosofi huma betang.
- 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya yang aman, tentram dan tertib.

Selain itu arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi pelaksanaan padan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

c. Sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan anggaran dan penyusunan program kegiatan tingkat Kota Palangka Raya.

b. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2013 – 2018, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
- b) Terkendalanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2016 – 2018 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kota Palangka Raya yang Aman, Tenram Tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100 %

2.3 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

- 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Penguatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
- 2. Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

b. Program

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 yaitu :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Program disiplin aparatur

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
6. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
7. Program pendidikan politik

2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan atau sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Penetapan Kinerja Tahun 2018
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1.	Peningkatan Kesadaran	100%

BAB.III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada tahun 2018 telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melalui penetapan kinerja Tahun 2018. dalam penetapan kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 untuk mencapai maksud kinerja dimaksud, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah di tentukan dalam penetapan kinerja Tahun 2018.

Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Sasaran Strategis : Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban

3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018

capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi		
					2016	2017	2018
1.	Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100%	100%	-	-	96 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi pada tahun 2016-2017 tidak ada pencapaian target disebabkan oleh adanya perubahan Indikator Utama dan indikator program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, sehingga hanya bisa di capai pada Tahun 2018 (96 %) dikarenakan ada beberapa indikator program yang belum mencapai target yang sudah di tetapkan di RPJMD. disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti penerbitan Surat Keterangan untuk Ormas, LSM, Yayasan tidak lagi dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melainkan langsung di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya melakukan verifikasi data dan memebri rekomendasiserta verifikasi dokumen bantuan keuangan Parpol yang mana pada RPJMD Target sebanyak 13 Parpol, sementara untuk realisasinya hanya 9 parpol yang mendapat jatah kursi di DPRD kota Palangka Raya. Sementara untuk indikator program yang lainnya sudah mencapai target.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu mencapai 96 % dari target 100 %, hal ini dikarenakan ada beberapa indikator program yang belum mencapai target yang disebabkan oleh di tahun berjalan kita berbenturan dengan peraturan- peraturan baru baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, kedepannya Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sudah menetapkan beberapa program prioritas kedalam RPJMD 2018-2023 dengan melihat capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya untuk bisa mencapai mencapai target yang sudah di tetapkan, solusi yang lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga akan lebih mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah di susun baik melalui media cetak maupun lewat webside Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Jika di lihat dari pagu dana yang diberikan Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tiap tahun anggaran akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik itu Belanja Tidak Langsung maupun belanja langsung untuk menopang kinerja sebagaimana table di bawah ini

No	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2018
1	8.336.465.590,60	7.792.630.268,80

Dengan jumlah 32 orang ASN dan 9 orang PTT yang 30 % latar belakang disiplin ilmunya yang berbeda-beda, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator utama harus benar-benar diperhitungkan. Namun dengan penurunan anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN Badan Kesatuan dan Politik Kota Palangka Raya menurun. Dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja.

Analisis Pencapaian kinerja sasaran di atas didukung oleh pencapaian program yang mendukung pencapaian sasaran antara lain :

Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Program	Indikator program	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Verifikasi dokumen bantuan keuangan parpol	13	9	70
		Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar/melapor	110	65	60
		Rasio pertemuan/rapat forum-forum	14	14	100
		Rasio pertemuan/rapat forkopimda	4	4	100
		Tim penanganan terpadu dan kominda kota Palangka raya	10	8	80

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan mempunyai sasaran terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban

masyarakat pada tahun 2018 dibebani anggaran sebesar Rp. 7.792.630.268,80 dengan realisasi Rp. 7.545.452.586 (96,82%).

Program ini didukung oleh 38 kegiatan dimana masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Palangka Raya. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari secretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya sebesar Rp. 7.733.294.364,80, yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.864.292.510,50 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.869.001.854,30 Realisasi penggunaan anggaran tersebut di tunjukan pada Tabel 3.6 dan 3.7

Tabel. 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.468.883.018,50	1.466.883.873	99,86
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	213.615.400	213.615.400	100
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	195.923.900	195.923.900	100
4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	154.814.000	154.699.000	99,93
5	Program kemitraan pengembangan wawasan	1.198.627.000	1.198.427.000	99,98

	kebangsaan			
6	Program pendidikan politik masyarakat	1.632.429.129	1.632.329.192	100
JUMLAH		4.864.292.510,50	4.861.878.365	99,95

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.869.001.854,30	2.683.574.221	93,54

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Palangka Raya sebesar Rp. 7.733.294.364,80, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.869.001.854,30 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.864.2292.510,50. Penyerapan anggaran tersebut adalah masing-masing Rp. 7.545.452.586 atau 97,57% untuk belanja langsung dan tidak langsung 4.861.878.365 atau 99,95% untuk belanja langsung. Dengan demikian total penyerapan anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 87.545.452.586 atau 97,57%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung termasuk sangat baik.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya secara umum telah berhasil menyelenggarakan program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada Tahun 2018, yang di ukur melalui pencapaian target indikator kinerja.

Dari luasan lokasi yang seyogyanya menjadi jangkauan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sesuai Visi dan Misi yang diemban dalam Tahun Anggaran 2018 baru sebagian Sasaran Strategis yang memenuhi target Capaian Kinerja. Hal ini terjadi kendala antara lain sebagai berikut :

1. Dana untuk beberapa komponen dari properti yang diusulkan semula.
2. Masih banyak berbagai kalangan yang kurang memahami pentingnya eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dari sisi Pembangunan Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Pembangunan Pgram yang disetujui tidak sesuai seolitik.
3. Sumber Daya Manusia sebagai pendukung Pencapaian Kinerja masih perlu peningkatan kualitas dan keterampilan manajerial yang tinggi dibidangnya, disamping juga kualitas sesuai keperluan.
4. Peralatan pendukung yang tidak kurang pentingnya adalah Peralatan Administrasi dan Sarana Mobilitas untuk memungkinkan kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan.

Dalam perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2013 - 2018. target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran.

Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat menjadi tolok ukur bagi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang lebih baik ditahun mendatang.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tidak terlepas dari Kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sekali lagi diperlukan kritik membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Lampiran : Capaian Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.

No	KEGIATAN/URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Belanja Pegawai/Personalia	2.869.001.854,30	2.683.574.221	93,54%
BELANJA LANGSUNG				
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	92.500.000	92.496.101	99,97%
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	470.859.000	469.017.012	95,61%
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.269.800	19.269.800	100%
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.690.900	82.613.650	99,91%
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	69.770.000	69.770.000	100 %
6.	Penyediaan Komponen Intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.000.000	13.000.000	100 %
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.500.000	16.500.000	100%
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	120.876.000	120.873.000	99,97%
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	418.467.318	418.394.310	99,98%
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	60.000.000	100%
11.	Penyediaan jasa event palangka fair	104.950.000	104.950.000	100%
B. BELANJA LANGSUNG				
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	94.500.000	94.500.000	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79.115.400	79.115.400	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100%
B. BELANJA LANGSUNG				
C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				

1.	Penyusunan pelaporan keuangan	21.050.000	21.050.000	100%
2.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	49.277.000	49.277.000	99.95%
3.	Penyusunan program dan rencana kerja	81.596.000	81.596.000	100%
4.	Penyusunan SOP dan standar pelayanan minimal (SPM)	44.000.000	44.000.000	100%
B. BELANJA LANGSUNG				
D. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				
1.	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Palangka Raya	154.814.000	154.699.000	99.93%
B. BELANJA LANGSUNG				
E. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				
1.	Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB)	132.020.000	132.020.000	100%
2.	Ikrar anak bangsa	59.295.000	59.050.000	99.66%
3.	Pembauran kebangsaan	919.412.000	919.412.000	100%
4.	Forum Bela Negara	87.900.000	87.900.000	100%
B. BELANJA LANGSUNG				
F. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				
1.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1.193.196.100	1.193.196.100	100%
2.	Tim Verifikasi kelengkapan administrasi partai politik	45.000.000	45.000.000	100%
3.	Kegiatan Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Presiden/Legislatif/Kepala daerah	394.233.092	394.133.092	99.97%
B. BELANJA LANGSUNG				
H. BELANJA MODAL				
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	94.500.000	94.500.000	100
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG		7.733.294.364	7.545.452.586	97.57